

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Inflasi

Inflasi merupakan suatu masalah yang cukup rumit dalam perekonomian suatu negara yang perlu disiasati secara cermat karena banyaknya variabel-variabel yang turut mempengaruhinya. Oleh sebab itu untuk mengatasinya dan mengendalikannya laju inflasi perlu dicari sumber-sumber penyebabnya sehingga laju pertumbuhan inflasi bisa diantisipasi sekecil mungkin, maksimal dibawah dua digit agar tidak membahayakan stabilitas perekonomian negara dan menjerat kehidupan ekonomi rakyat.

Definisi inflasi sangat banyak ragamnya seperti yang dapat kita temukan dalam literature ekonomi. Namun pada prinsipnya masih terdapat beberapa kesatuan pandangan bahwa inflasi merupakan suatu fenomena dan dilemma ekonomi.

Boediono (1998:64) menjelaskan definisi inflasi yaitu, yang dimaksud dengan inflasi adalah "Kecenderungan harga-harga yang menaik secara umum dan terus-menerus". Sedangkan Guritno Mangkoesobroto dan Algifari (1998:53), menjelaskan bahwa penertian inflasi adalah "tingkat perubahan harga-harga secara umum".

Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus menerus. Ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang itu naik dengan prosentase yang sama, mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidaklah bersamaan, yang penting terdapat kenaikan harga umum barang-barang secara terus menerus selama satu periode tertentu. (Nopirin, 174: 1992).

Kenaikan harga-harga yang berlaku dari satu waktu ke waktu lainnya tidak berlaku secara seragam. Kenaikan tersebut biasanya berlaku kebanyakan barang, tetapi tingkat kenaikan berbeda. Ada yang tinggi persentasinya dan ada yang rendah. Disamping itu sebagian barang tidak mengalami kenaikan. Berlakunya tingkat kenaikan harga yang berbeda tersebut menyebabkan indeks harga perlu dibentuk untuk menggambarkan tingkat perubahan harga-harga yang berlaku dalam sesuatu negara. Untuk mengukur tingkat inflasi, Indeks harga yang selalu digunakan adalah indeks harga konsumen, yaitu indeks harga dari barang-barang yang selalu digunakan para konsumen (Sadono Sukirno, 1999 hal 20-21)

Inflasi dihitung melalui Indeks Harga Konsumen (IHK). Karena perubahan dari tahun ketahun menunjukkan besarnya laju inflasi. Untuk menghitung IHK dipergunakan rumus:

$$\text{IHK} = \frac{\sum P_n \cdot P_{n-1} Q_0}{\sum P_0 \cdot P_0}$$

Dimana :

I : IHK bulan ke-n

P_n : Harga pada bulan ke-n

$P_0 \cdot P_0$: Nilai konsumen pada tahun dasar

Berdasarkan angka IHK, akan dapat dihitung besarnya laju inflasi menggunakan rumus:

$$I_t = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100$$

Dalam teori kuantitas, dijelaskan bahwa sumber utama terjadinya inflasi adalah karena adanya kelebihan permintaan (*demand*) sehingga uang yang beredar dimasyarakat bertambah banyak

a. Demand-pull Inflation.

Demand-pull Inflation terjadi karena adanya kenaikan permintaan agregatif dimana kondisi produksi telah berada pada kesempatan kerja penuh (*full employment*). Kenaikan kesempatan agregatif selain dapat menaikkan harga-harga juga dapat meningkatkan produksi. Jika kondisi produksi telah berada pada kesempatan kerja penuh, maka kenaikan permintaan tidak lagi mendorong kenaikan *output* (produksi), tetapi hanya mendorong kenaikan harga-harga yang bias juga disebut Inflasi Murni (*Pure Inflation*). Namun jika penambahan permintaan melebihi *gross National Product* (GDP) pada kesempatan kerja penuh, ini akan mengakibatkan *Inflationary Gap* dan selanjutnya terjadilah *Inflasi*.

b. Cost-push Inflation.

Berbeda dengan demand-pull inflation, cost-push inflation biasanya ditandai dengan kenaikan harga serta turunnya produksi. Jadi, inflasi yang dibarengi dengan resesi. Keadaan ini timbul biasanya dimulai dengan adanya

penurunan dalam penawaran total (*agregat supply*) sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi

Kenaikan biaya produksi ini dapat timbul karena adanya beberapa factor diantaranya:

- 1). Perjuangan serikat buruh yang berhasil untuk menuntut kenaikan upah.
- 2). Suatu industri yang sifatnya monopolistis, manager dapat menggunakan kekuasaannya dipasar untuk menentukan hargayang lebih tinggi.
- 3). Kenaikan harga bahan baku industri.

c. Teori Kuantitas uang (Irving Fisher)

Teori ini mendasarkan pada falsafah hukum say, bahwa perekonomian selalu berada dalam keadaan *full employment* (Nopirin 168:1992). Secara sederhana Irving fisher merumuskan teorinya sebagai berikut:

$$MV = PT$$

Dimana :

M : Jumlah Uang Beredar

V : Tingkat perputaran Uang (*Velocity*)

P : Harga Barang

T : Volume Barang (Obyek transaksi)

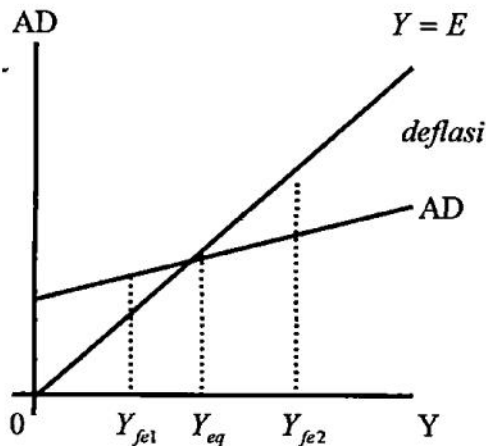
Persamaan tersebut menunjukkan suatu identitas (*identity*), sebab selalu benar. Artinya semua jumlah unit barang yang ditransaksikan (T) dikalikan dengan harga (P) harus atau selalu sama dengan jumlah uang (M) dikalikan

dengan perputarannya (total pengeluaran transaksi). Atau dengan kata lain total pengeluaran (MV) sama dengan nilai barang yang di beli (PT).

Perubahan jumlah uang yang beredar akan mengakibatkan perubahan harga secara proporsional. Jika jumlah uang beredar naik dua kali lipat maka harga barang akan naik dua kali juga. Pandangan tersebut didasarkan pada anggapan sebagai berikut: dalam persamaan $MV = PT$, T dianggap tetap karena selalu berada dalam keadaan *full employment* (atas dasar hukum say). Velocitas juga dianggap tetap, hanya akan berubah kalau terjadi perubahan dalam kebiasaan masyarakat dalam melakukan pembayaran. Misalnya penggunaan alat-alat pembayaran baru yang mempengaruhi banyaknya transaksi yang dilakukan.

d. Teori Keynes

Teori Keynes menjelaskan bahwa, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonominya. Dimana terjadi perebutan rezeki diantara kelompok-kelompok social yang menginginkan bagian yang lebih besar dari pada yang disediakan oleh masyarakat tersebut, ini berarti permintaan masyarakat akan barang-barang selalu akan melebihi jumlah barang-barang yang disediakan akibatnya timbullah apa yang disebut *inflationary gap*. Inflationary gap ini timbul karena golongan-golongan masyarakat berhasil memperoleh dana untuk pembelian barang-barang yang disukung dengan dana. Golongan masyarakat seperti ini mungkin adalah pemerintah sendiri, yang berusaha memperoleh bagaian yang lebih besar dari output masyarakat dengan jalan menjalankan defisit dalam anggaran belanjanya yang dibiayai dengan mencetak uang baru.



Seandainya pendapatan naik, maka keseimbangan ekonomi terganggu karena permintaan agregatif lebih kecil dari penawaran agregatif, ini menyebabkan perusahaan menghadapi tingkat persediaan barang produksi lebih besar dari yang digudang dengan mengurangi investasi, sehingga pendapatan nasional turun. Sebaliknya, apabila pendapatan nasional turun, maka penawaran agregatif lebih kecil dari permintaan agregatif, akibatnya pengusaha menghadapi tingkat persediaan barang lebih kecil dari jumlah yang diinginkan, sehingga memperbesar produksi dengan menaikkan investasi, akibatnya pendapatan nasional mengalami kenaikan. Apabila tingkat pendapatan *full employment*, permintaan agregatif lebih kecil dari penawaran agregatif, maka pendapatan nasional akan turun, maka terjadi kesenjangan deflasi, karena pendapatan *full employment* (Y_{fe2}) lebih besar dari pendapatan keseimbangan (Y_{eq}). Apabila tingkat pendapatan *full employment* pendapatan agregatif lebih besar dari penawaran agregatif, maka pendapatan akan naik, maka terjadi kesenjangan inflasi, karena pendapatan *full employment* (Y_{fe1}) lebih kecil dari pendapatan keseimbangan (Y_{eq}).

2. Suku bunga

Suku bunga merupakan indikator yang sangat penting dalam perekonomian suatu Negara, seperti Indonesia. Di Indonesia suku bunga menunjukkan angka yang cukup tinggi dimana sangat mempengaruhi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Banyak ekonom beranggapan bahwa kebijakan uang ketat yang diadopsi oleh pemerintah beberapa tahun yang lalu telah menjadi pendorong utama tingginya tingkat suku bunga di Indonesia akan tetapi ini merupakan bagian dari kebijakan otoritas moneter untuk selalu aktif dalam menurunkan suku bunga. Suku bunga yang dapat berperan untuk mentransmisikan sinyal-sinyal yang diberikan oleh kebijakan moneter kesasaran akhir, dalam hal ini laju inflasi.

Kebijakan moneter adalah tindakan pemerintah (atau Bank Sentral) untuk mempengaruhi situasi makroekonomi yang dilaksanakan melalui pasar uang. Secara khusus, kebijakan moneter dapat diartikan sebagai tindakan makro pemerintah (Bank Sentral) dengan cara mempengaruhi proses penciptaan uang. Proses penciptaan uang ini dapat mempengaruhi jumlah uang beredar. Dengan mempengaruhi jumlah uang beredar pemerintah dapat mempengaruhi tingkat suku bunga yang berlaku di pasar uang. Dan melalui tingkat suku bunga pemerintah dapat mempengaruhi pengeluaran investasi (I), dan selanjutnya permintaan agregat (AD) dan pada akhirnya tingkat harga (P) dan output.

Di dalam perekonomian tingkat pengeluaran masyarakat dapat diatur dengan mempengaruhi penawaran uang dalam masyarakat atau mempengaruhi tingkat bunga. Kebijakan pemerintah untuk tujuan dan maksud yang demikian

dinamakan kebijakan moneter. Kebijakan tersebut berkaitan dengan berbagai kebijakan atau tindakan yang diambil untuk mengatur uang yang beredar serta biaya dan ketersediaan kredit dalam perekonomian. *Keynes* menjelaskan tingkat bunga merupakan fenomena moneter dimana tingkat bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan akan uang dan uang akan mempengaruhi kegiatan ekonomi sepanjang uang ini mempengaruhi tingkat bunga. Sebagai alat untuk menekan inflasi, kenaikan suku bunga dimaksudkan untuk menarik jumlah uang yang beredar di masyarakat, yang jumlahnya besar, melebihi kebutuhan aktivitas perekonomian. Dengan naiknya suku bunga diharapkan pemilik uang akan menabungkan uangnya di bank. Uang akan masuk ke dalam kas bank umum. Itu berarti jumlah uang yang beredar akan berkurang. Berkurangnya jumlah uang yang beredar akan dapat meredakan inflasi. Uang yang beredar tidak lagi liar dan terkendali di dalam penggunaannya, baik dalam pembelian barang maupun dalam pembelian mata uang asing. Motif spekulasi penggunaan uang dapat dikurangi sehingga kecepatan uang yang beredar melemah.

Jadi tingkat suku bunga sebagai besarnya balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli dan menjual produknya. Sebagai alat untuk menekan inflasi, kenaikan BI rate dimaksudkan untuk menarik jumlah uang yang beredar di masyarakat, yang jumlahnya besar, melebihi kebutuhan aktivitas perekonomian. Dengan naiknya suku bunga diharapkan pemilik uang akan menabungkan uangnya di bank. Uang akan masuk ke dalam kas bank umum. Itu berarti jumlah uang yang beredar akan berkurang. Berkurangnya jumlah uang yang beredar akan dapat meredakan inflasi.

Uang yang beredar tidak lagi liar dan terkendali di dalam penggunaannya, baik dalam pembelian barang maupun dalam pembelian mata uang asing. Motif spekulasi penggunaan uang dapat dikurangi sehingga kecepatan uang yang beredar melemah.

Tingkat suku bunga memiliki beberapa fungsi atau peran dalam perekonomian, yaitu (Puspoprano, 2004:71):

1. Membantu mengalirnya tabungan berjalan kearah investasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi.
2. Mendistribusikan jumlah kredit yang tersedia, pada umumnya memberikan dana kredit kepada proyek investasi yang menjanjikan hasil tinggi.
3. Menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan permintaan akan uang dari suatu Negara.
4. Merupakan alat penting menyangkut kebijakan pemerintah melalui pengaruhnya terhadap jumlah tabungan dan investasi.

Dalam kegiatan perbankan kita mengenal ada 2 macam bunga yang diberikan kepada nasabah yaitu (Kasmir, 200:121)

1. Bunga Simpanan yaitu Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya dibank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposit.
2. Bunga Pinjaman yaitu Bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Sebagai contoh bunga kredit.

Tingkat suku bunga tidak bersifat seragam akan tetapi bermacam-macam suku bunga yang berbeda. Namun demikian dalam analisis sering diasumsikan satu suku bunga fundamental dalam perekonomian yang disebut suku bunga murni atau suku bunga bebas resiko yang merupakan komponen dari semua suku bunga.

3. Jumlah Uang Beredar

Jumlah uang beredar yaitu jumlah uang yang tersedia dalam perekonomian dan dapat digunakan untuk membiayai transaksi-transaksi yang dilakukan dalam masyarakat. Dalam analisis Makroekonomi yang terutama diperhatikan adalah dua konsep dari penawaran uang: M1 dan M2. Penawaran uang dalam arti sempit, yaitu M1, meliputi uang kertas dan logam yang ada dalam peredaran (uang kartal), dan tabungan giral dalam bank-bank umum /perdagangan komersial. Sedangkan M2, yaitu pengertian penawaran uang yang lebih luas, meliputi M1 dan ditambah dengan tabungan masyarakat yang didepositokan dalam bank komersial (Sukirno, 2000:143).

Uang kartal adalah uang tunai yang berupa uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh pemerintah atau bank sentral. Jenis uang logam yang paling sering digunakan adalah emas dan perak, karena mengandung nilai khas. Uang logam biasanya digunakan untuk pembayaran yang bernilai kecil. Uang kertas dan logam di beberapa negara dikelola oleh pemerintah melalui bank sentral atau pengelola moneter. Semua mata uang di Indonesia dikeluarkan oleh bank sentral yaitu bank indonesia.

Sedangkan yang dimaksud dengan uang giral adalah seluruh nilai saldo rekening koran (*giro*) yang dimiliki masyarakat yang disimpan pada bank-bank umum. Saldo rekening koran berupa cek, yaitu suatu alat untuk melakukan tukar-menukar. Cek dijamin dengan deposito yang tersedia, sehingga bila uang ditarik dari bank oleh pihak penerima pembayaran adalah uang yang ditransfer. Nilai cek yang sama halnya dengan uang, sehingga pemegang dapat memperoleh nilai penuh yang disebut dalam cek. Oleh karenanya saldo yang ada dalam rekening koran merupakan bagian dari uang beredar, sebab sewaktu-waktu bisa digunakan oleh pemiliknya untuk memenuhi kebutuhannya.

Jadi yang dimaksud dengan jumlah uang beredar adalah penjumlahan dari uang kartal dan uang giral atau sering disebut uang dalam arti sempit.

$$M1 = C + DD$$

Dimana :

$M1$ = jumlah uang beredar

C = uang kartal (*currency*)

DD = uang giral (*demand deposits*)

Pengertian lain dari uang beredar dalam arti luas adalah bahwa bukan hanya uang tunai dan saldo rekening koran (cek) saja yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi uang milik masyarakat yang disimpan di bank dalam bentuk deposito berjangka (*time deposit*) atau tabungan, juga mempunyai ciri yang mendekati uang tunai. Keduanya bisa dicairkan menjadi uang tunai untuk membiayai transaksi sewaktu-waktu sesuai dengan perjanjian. Deposito berjangka dan tabungan ini sering disebut dengan istilah

quasi money atau *near money* yaitu sesuatu yang mendekati ciri dari uang. Jadi menurut pengertian kedua ini, uang yang beredar adalah *narrow money* ditambah *quasi money*.

$$M1 = C + DD + TD$$

$$M2 = M1 + TD$$

Dimana :

M2 = uang beredar dalam arti luas

TD = deposito berjangka (*time deposit*)

Deposito berjangka banyak ditentukan oleh perilaku masyarakat dalam hal penentuan besar atau kecilnya kekayaan yang akan dipegang dalam bentuk deposito berjangka (TD). Jelasnya variabel ini banyak dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat bunga dan perubahan harga (resiko inflasi) serta perilaku bank-bank umum. Sedangkan definisi yang paling luas dari uang beredar dikenal dengan M3 yang merupakan dari penjumlahan dari M2 dengan semua deposito pada lembaga-lembaga keuangan lain (non bank) (Boediono, 1990:2)

Peranan jumlah uang beredar sangat dominan dalam mempengaruhi tingkat inflasi. Hal ini disebabkan oleh fungsi uang sebagai alat pembayaran, penimbun kekayaan dan alat untuk berspekulasi. Menurut teori kuantitas yang merupakan teori paling tua mengenai inflasi, Irving fisher merumuskan teori kuantitas uang yang dikenal dengan sebutan persamaan pertukaran (*the equation of exchange*) sebagai berikut :

$$MV = PT$$

Dimana :

M = Jumlah uang beredar

V = Perputaran uang dalam suatu periode

P = Harga barang

T = Volume barang yang diperdagangkan

Persamaan diatas menunjukkan bahwa nilai barang yang diperdagangkan sama dengan jumlah uang beredar dikalikan dengan kecepatan perputaran (Sugiyanto, 1995 : 148). Inflasi dipengaruhi oleh adanya penambahan volume uang yang beredar (apakah uang kartal atau giral). Tanpa adanya kenaikan jumlah uang yang beredar, kejadian seperti, misalnya kegagalan panen hanya akan menaikkan harga-harga barang untuk sementara saja. Penambahan jumlah uang ibarat “bahan bakar“ bagi api inflasi. bila jumlah uang tidak ditambah, inflasi akan berhenti dengan sendirinya, apapun sebab awal dari kenaikan harga tersebut (Boediono, 1990:167). Jadi agar tidak terjadi inflasi maka jumlah uang beredar harus ditekan.

5. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan seluruh produksi atau penjumlahan dari semua barang dan jasa-jasa akhir atau semua nilai tambah yang dihasilkan oleh warga negara tertentu dalam jangka waktu tertentu pula (biasanya satu tahun).

Menurut pendekatan produksi, Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu setahun (Dumairy, 1990). Kesempatan

kerja dalam perekonomian akan menentukan tingkat kegiatan ekonomi dan tingkat produksi atau pendapatan nasional yang dihasilkan.

Dalam analisis IS-LM keseimbangan kegiatan perekonomian ditentukan oleh interaksi keadaan di pasar uang dan pasar barang. Keseimbangan pendapatan nasional tercapai apabila sifat hubungan diantara suku bunga dengan pendapatan nasional yang berlaku di pasar barang adalah sama dengan yang berlaku di pasar uang, yaitu bila kurva IS berpotongan dengan kurva LM. Dalam analisis IS-LM dapat diperhatikan efek kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi kegiatan perekonomian. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang dijalankan yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Pendapatan riil masyarakat berpengaruh terhadap tingkat inflasi. Apabila pendapatan riil masyarakat turun maka inflasi akan meningkat (Sukirno, 2000).

Perubahan produk domestik bruto tidak berpengaruh secara langsung terhadap laju inflasi, artinya pada titik (digit) tertentu laju inflasi akan berakibat pada penurunan produksi, misalnya pada kondisi inflasi tinggi. Inflasi yang tinggi akan mengakibatkan pemerintah melakukan resesi (terjadi stagflasi) dengan kebijakan moneter dan fiscal. Stagflasi terjadi apabila inflasi naik dan aoutput turun atau sekurang-kurangnya tidak naik. Dalam teori Philips kenaikan tingkat inflasi akan diikuti oleh tuntutan pekerja (untuk mempertahankan upah riil), hal tersebut akan berakibat pada keuntungan produksi yang merosot, sehingga investor melakukan rasionalisasi dengan mengurangi tenaga kerja (Sadono Sukirno, 1981).

B. Studi Empiris Sebelumnya.

1. Agus Tri Basuki

Meneliti tentang Dampak Kenaikan Tarif Dasar Listrik dan BBM Terhadap Fungsi Inflasi di Indonesia (1991-2001) dengan menggunakan pendekatan model PAM. Dari penelitian itu diambil kesimpulan bahwa tingkat inflasi mempunyai hubungan positif dengan jumlah uang beredar dan berhubungan terbalik dengan tingkat suku bunga dan produk domestik bruto. Variabel produk domestik bruto memberikan pengaruh yang tidak konsisten karena selama krisis moneter untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sangat sulit dilakukan di Indonesia, karena pertumbuhan pembangunan sangat mudah sekali diwarnai dengan kenaikan harga-harga. Setiap kenaikan relatif PDB sebesar 1 persen akan mengakibatkan kenaikan inflasi absolut sebesar 5,1 poin.

2. Neni Noviarita.

Dalam tesisnya yang berjudul Analisis Inflasi Di Indonesia (1980:03 – 2002:04) dengan menggunakan pendekatan model Dinamis, menganalisis secara empiris inflasi di Indonesia serta variabel yang mempengaruhinya, yang antara lain Jumlah Uang Beredar, Tingkat Suku Bunga, Nilai Tukar, Pengeluaran Pemerintah, Ekspektasi Inflasi dan Produk Domestik Bruto. Dalam penelitian tersebut memberikan gambaran penelitian dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek

variabel produk domestik bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi. Dalam jangka panjang terdapat indikasi bahwa Jumlah Uang Beredar, Nilai tukar, Ekspektasi Inflasi, dan variabel Dummy berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi, sementara tingkat suku bunga, produk domestik bruto, pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap inflasi.

3. Kurnianingrum

Melakukan penelitian mengenai Inflasi yang terjadi di Indonesia dari tahun 1973 – 1999, dengan factor-faktor yang mempengaruhinya antara lain yaitu Jumlah uang beredar, Produk domestik bruto, Pengeluaran pemerintah, dan Pertumbuhan impor, dengan menggunakan analisa korelasi dan regresi linier. Hasil penelitian selama periode tersebut diketahui bahwa terdapat nilai koefisien determinasi yang tinggi yaitu sebesar 82,20 persen dan juga didukung nilai F-test yang sangat signifikan. Dalam analisis hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Jumlah uang beredar, Produk domestik bruto, Pengeluaran pemerintah, dan Pertumbuhan impor mempunyai pengaruh positif terhadap laju inflasi secara signifikan. Dalam penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa penyebab laju inflasi di Indonesia cenderung dari sector moneter.

4. Helina

Dalam skripsinya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Laju Inflasi Di Indonesia Tahun 1990.1 – 2002.4 (Pendekatan Model Partial Adjustment Model), menganalisis factor-faktor yang berpengaruh terhadap laju inflasi di Indonesia. Dalam kesimpulannya dinyatakan bahwa variabel Jumlah Uang Beredar berpengaruh positif terhadap laju inflasi, variabel produk domestik bruto berpengaruh negatif, serta variabel nilai tukar berpengaruh positif terhadap laju inflasi di Indonesia.

C. Hipotesis

Dalam penelitian ini digunakan hipotesis :

1. Diduga bahwa dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang terdapat hubungan negatif dan berpengaruh secara signifikan antara tingkat suku bunga terhadap inflasi di Indonesia.
2. Diduga jumlah uang beredar mempunyai hubungan yang positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat inflasi di Indonesia baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang
3. Diduga Nilai tukar mempunyai hubungan positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat inflasi.
4. Diduga PDB mempunyai hubungan negatif dan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat inflasi di Indonesia